



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Alamat : Jl. AW. SUMARMO NO. 46 B Telp. (0281) 894896
PURBALINGGA 53319

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

PURBALINGGA, Januari 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia NYA, sehingga kami mampu menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 merupakan gambaran hasil pelaksanaan kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga selama Tahun Anggaran 2021.

Dokumen Laporan Kinerja DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu jajaran DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dengan rasa terbuka menerima saran, kritik yang membangun demi penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat membantu informasi tentang kinerja DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kewenangan tugas dan tanggung jawab selama tahun 2021.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas tersusunya Laporan Kinerja ini disampaikan terima kasih.

Purbalingga, Januari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA


Drs. IMAM HADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19650104 198607 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
a. Gambaran Umum SKPD	
b. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	
c. Sistematika Penulisan	
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	9
a. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
b. Realisasi Anggaran/Keuangan	
BAB IV : PENUTUP	42
a. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan	
b. Permasalahan yang Dihadapi	
c. Strategi Pemecahan Masalah	
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga ini adalah sebagai bentuk laporan akuntabilitas kinerja yang dicapai dalam pemerintahan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dalam tahun anggaran yang telah dilaksanakan Tahun 2021.

Sebagai Implementasi dari Sistem Laporan Kinerja yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka disusun Lampiran Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 adalah untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2021, dengan tujuan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rencana kinerja tahun anggaran berjalan yang telah ditetapkan.

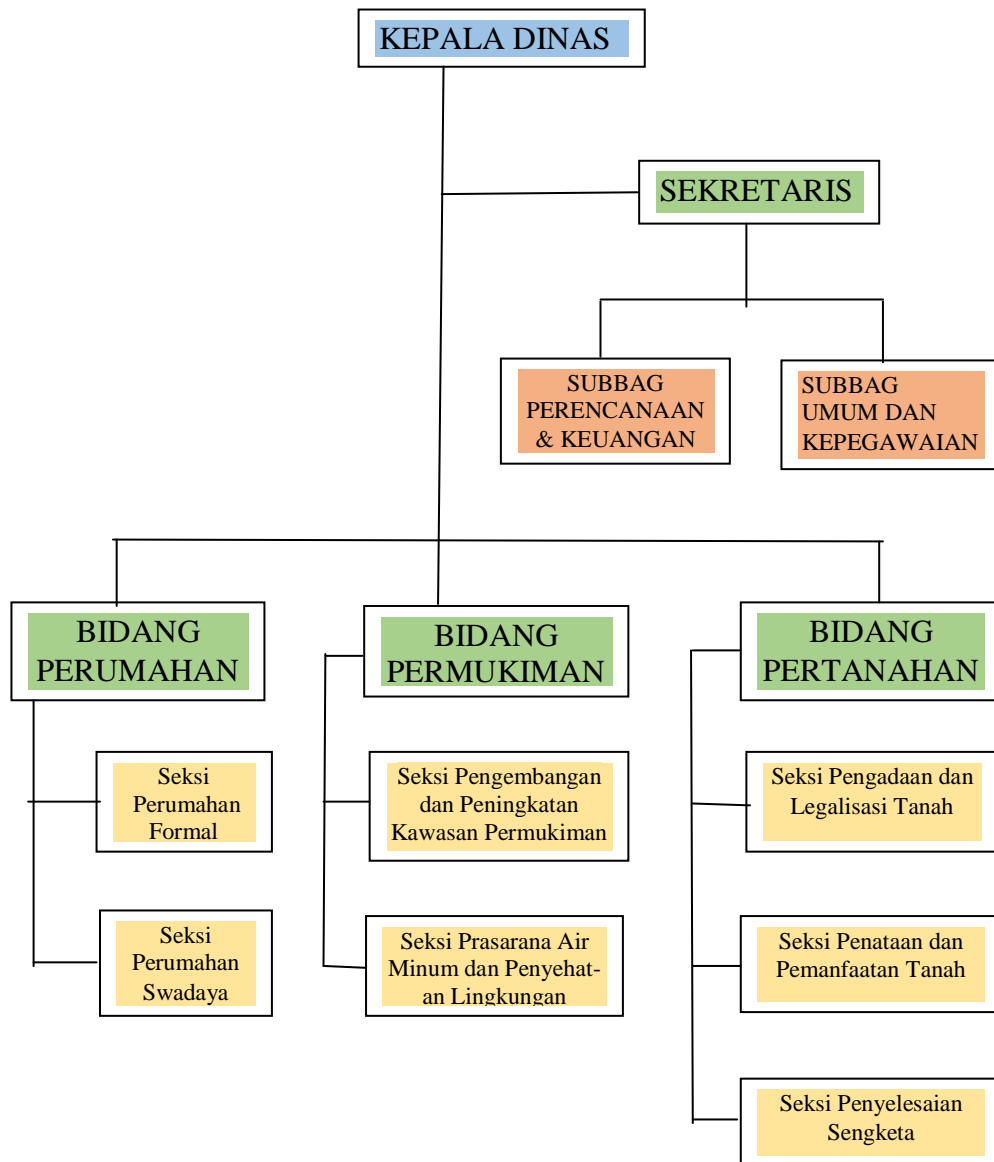
A. Gambaran Umum OPD

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga keberadaanya sebagai satuan kerja perangkat daerah dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perumahan, meliputi :
 - a. Seksi Perumahan Formal
 - b. Seksi Perumahan Swadaya
4. Bidang Permukiman, meliputi :
 - a. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Pertanahan :
 - a. Seksi Pengadaan dan Legalisasi Tanah
 - b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Tanah
 - c. Seksi Penyelesaian Sengketa
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA**



Tabel Data Kepegawaian per Desember 2021

No	Jenis Kepegawaian	Tingkat Pendidikan						
		SD	SLTP	SLTA	D1-D3	S1	S2	JML
1	PNS	-	1	5	-	14	2	22
2	CPNS	-	-	-	-	1	-	1
3	NON PNS							34
	Jumlah							57

Tabel Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan Struktural per Desember 2021

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretaris	1	
3	Kepala Bidang	3	
4	Kepala Sub Bagian	1	
5	Kepala Seksi	5	
	Jumlah	11	

Tabel Data Jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan per Desember 2021

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah	Keterangan
1	Tingkat I	0	
2	Tingkat II	1	
3	Tingkat III	4	3 blm diklat
4	Tingkat IV	6	2 belum diklat
	Jumlah	11	5 belum diklat

Tabel Asset

Tabel Asset yang dikelola OPD per 31 Desember 2020

No	Jenis Asset	Jumlah	Keterangan
1	Lahan lokasi perkantoran	2.100,12 m ²	
2	Bangunan Perkantoran	1.167 m ²	
3	Mobil Station	7 unit	
4	Mobil Pickup	1 unit	
5	Sepeda Motor	16 unit	
6	Kendaraan Roda 3	-	

B. Permasalahan Utama:

Permasalahan-permasalahan pembangunan dalam lingkup Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga mengacu pada isu strategis untuk prioritas perencanaan pembangunan yaitu :

1. Masih adanya rumah tidak layak huni.
2. Adanya kecenderungan timbulnya kawasan kumuh
3. Adanya rumah tangga yang belum ketercukupan akses air bersih dan sistem air limbah rumah tangga.
4. Masih adanya bidang tanah Pemda yang belum bersertifikat.

Disisi internal organisasi adalah terbatasnya SDM dan sarana prasarana operasional penunjang aktivitas kegiatan kedinasan.

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka isu strategi dalam implementasi program dan kegiatan diarahkan untuk :

1. Peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin guna mengurangi rumah tidak layak huni
2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman guna meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dan mengurangi permukiman kumuh
3. Peningkatan penyediaan akses air minum bagi masyarakat
4. Peningkatan penanganan akses sanitasi air limbah domestik/rumah tangga

5. Peningkatan pensertifikatan dan pengelolaan tanah Pemkab
Serta optimalisasi penataan dan pemanfaatan aset tanah pemerintah daerah guna terwujudnya kawasan perkotaan serta peningkatan kualitas prasarana ruang publik guna mengakomodasi dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan.

Sedangkan dari sisi internal organisasi yaitu ketersediaannya kendaraan operasional kegiatan dan tersediaanya tenaga yang profesional pada Dinas Perumahan dan Permukiman.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. BAB I : PENDAHULUAN
 - d. Gambaran Umum OPD
 - e. Permasalahan Utama
 - f. Sistematika Penulisan
2. BABII: PERENCANAAN KINERJA
 - A. Perencanaan Strategis
 - a. Visi
 - b. Misi
 - c. Tujuan
 - d. Sasaran
 - e. Kebijakan program dan kegiatan
 - B. Perjanjian Kinerja TA. 2021
3. BABIII: AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Realisasi Anggaran
4. BAB IV: PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Langkah tindak lanjut

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja 2021
- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 mempertimbangkan segenap kekuatan dan peluang serta kelemahan yang ada pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga, dengan mengacu pada Visi Kabupaten Purbalingga dalam RPJMD 2016 – 2021 yaitu ***PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA***, sedangkan Misi yang terkait dengan OPD DINRUMKIM yaitu :

Misi 1 yaitu, *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.*

Misi 3 yaitu, *Mengupayakan Ketercukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.*

Misi 6 yaitu, *Mewujudkan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang Sehat dan Menarik untuk Melaksanakan Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Gerakan Masyarakat, yang Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur / Sarana Prasarana Wilayah yang Memadai.*

Guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan serangkaian program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen Renja tahun anggaran 2021 dengan target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2021 dalam tabel sebagai berikut :

TABEL PERJANJIAN

**TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN
PURBALINGGA**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni		Persentase rumah layak huni	persen	96,5%
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	persen	72%
2	Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas		Persentase permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	persen	93,5%
2		Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas	Luasan kawasan tidak kumuh	Ha	1.442
		Terlayannya air bersih	Cakupan layanan air bersih	Persen	93%
		Terlayannya sanitasi masyarakat	Cakupan layanan sanitasi	Persen	88%
3	Terwujudnya legalitas dan tertib pemanfaatan tanah		Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Persen	100%
		Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah	Persentase tanah milik Pemda bersertifikat	Persen	64,1%
			Persentase tanah Pemda yang dimanfaatkan	Persen	80,15%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Pemukiman dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tujuan/sasaran tahun anggaran 2021 dapat diuraikan secara garis besar dalam bentuk tabel sebagai berikut :

TABEL CAPAIAN KINERJA SASARAN 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni		Persentase rumah layak huni	persen	96,5	96,96	100,47
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	persen	72	72,62	100,86
2	Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas		Persentase permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	persen	93,5	95,4	101,81
		Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas	Luasan kawasan tidak kumuh	Ha	1.442	1.442	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		Terlayani nya air bersih	Cakupan laya-nan air bersih	Persen	93	93,01	100,01
		Terlayani nya sanitasi masyarakat	Cakupan layan an sanitasi	Persen	88	93,18	105,88
3	Terwujudnya legalitas dan tertib pemanfaatan tanah		Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepen tingan umum	Persen	100	100	100
		Meningka tnya kapasitas status dan pemanfaa tan tanah	Persentase tanah milik Pemda bersertifikat	Persen	64,01	70,64	110,35
			Persentase tanah Pemda yang dimanfa- atkan	Persen	80,15	87,6	109,3

Misi 3 RPJMD 2016-2021: Mengupayakan Ketercukupan Kebutuhan

Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni

- **Pemenuhan Kebutuhan Papan.**

Kebutuhan dasar akan rumah dan perumahan bagi masyarakat tentunya senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat tradisional, kebutuhan akan rumah dan perumahannya juga masih sederhana. Sedangkan dalam masyarakat moderen, rumah dan perumahan yang diidamkan juga akan lebih kompleks dengan pemenuhan berbagai fasilitas kehidupan moderen yang tertata yang membentuk sebuah kawasan permukiman yang representatif sebagaimana yang diimpikan.

Perumahan selain jadi kebutuhan dasar manusia juga mempunyai fungsi yang strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang serta merupakan pengaktualisasian jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat melalui pemenuhan kebutuhan papannya.

Hasil evaluasi pada tujuan: Meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni dengan indikator persentase rumah layak huni mendapatkan nilai rata-rata 100,62% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel : *Capaian tujuan* Meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni

Indikator Kinerja	Satuan	Reali sas 2015	Reali sasi 2016	Reali sasi 2017	Reali sasi 2018	Reali sasi 2019	Reali sasi 2020	Target 2021	Reali sasi 2021	Capaian Kinerja %
Persentase rumah layak huni	Persen	88,6	88,58	93,28	93,63	95,21	96,09	96,5	96,96	100,47

Capaian kinerja tujuan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni perkembanganya dari tahun ke tahun terus meningkat. Sampai dengan tahun 2019 capaian kinerjanya tercapai 95,21% (235.985 rumah) dan persentase jumlah RTLH menjadi 4,79% (11.827 rumah).

Pada tahun 2020 jumlah rumah tangga yang telah memiliki rumah sebanyak 247.426 KK, berdasarkan target pada perjanjian kinerja sebesar 95,5% realisasinya persentase rumah layak huni tercapai 96,09% (237.748 rumah). Sedangkan pada tahun 2021 jumlah rumah tangga yang memiliki rumah sebanyak 247.852 KK. Target perjanjian kinerja sebesar 96,5 %, realisasi rumah layak huni sebesar 96,96 % Dengan demikian bila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Rencana Strategis (Renstra) OPD capaian sampai dengan tahun 2021 persentase rumah

layak huni adalah sebesar 96,5%, sehingga melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 100,47%.

Keberhasilan pencapaian ini pada tahun 2021 adalah dari realisasi pelaksanaan Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha dan Sub Keegiatannya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Aktifitasnya melalui rehab RTLH dana DAU dan fasilitasi rehab RTLH dari dana DAK, BSPS, Bankeudes provinsi dan dana DD serta kontribusi pemugaran RTLH dari bantuan CSR. Capaian kinerja Sasaran samapai Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel : Capaian Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni

Indikator Kinerja	Satuan	Reali sasi 2016	Reali sasi 2017	Reali sasi 2018	Reali sasi 2019	Reali sasi 2020	Target 2021	Reali sasi 2021	Capaian Kinerja %
Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	Persen	10,35	29,09	43,85	56,975	64,95	72	72,62	100,86

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni* dengan indikator persentase rumah tidak layak huni yang ditangani mendapatkan nilai rata-rata 100,86 dengan kategori sangat berhasil.

Dari tabel tersebut, jumlah RTLH yang ditangani sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 72,62 % (19.970 rumah) sedangkan jumlah rumah tidak layak huni yang belum ditangani sebanyak 27,38% (7.528 rumah) dari jumlah target RTLH 27.498 rumah (data mandiri Kabupaten 2015).

Guna mewujudkan sasaran ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mengeluarkan kebijakan di sektor perumahan dan permukiman yang pada tahun 2021 melalui Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha dan Sub

Kegiatannya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Aktifitasnya berupa rehab RTLH dari dana DAU dan Fasilitas rehab RTLH dari dana DAK, BSPS, Bankeudes Provinsi serta kontribusi rehab RTLH dari dana DD dan CSR.

Pada tahun 2021 jumlah rumah tidak layak huni yang berhasil direhab mencapai 2.014 rumah dengan rincian rincian 27 RTLH dari dana DAK, 488 RTLH dari dana DAU, 300 RTLH dari dana BPS, 313 RTLH dari dana Bankeudes Prop, 881 RTLH dari dana DD dan 5 RTLH dari CSR.

Kendala dalam pelaksanaan adalah :

- a. Rehabilitasi RTLH dari dana DAU jumlahnya menurun cukup banyak karena sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan Covid 19.
- b. Sebagian anggota Pokmas RTLH dalam pengajuan proposal pencairan tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan rehab RTLH jadi mundur.
- c. Tingkat gotong royong sebagian masyarakat sudah mulai menurun sehingga kesulitan mencari tenaga kerja/tukang.
- d. Adanya tradisi yang diyakini sebagian masyarakat tentang perhitungan waktu untuk memulai rehab rumah akibatnya waktu pelaksanaan rehab rumah tidak sesuai rencana.

Upaya yang ditempuh adalah :

- a. Mengajukan Rehab RTLH dari dana DAU untuk tahun berikutnya dapat dianggarkan lebih besar lagi.
- b. Koordinasi dengan Pokmas di masing-masing desa bersama Tim Pembina pada masing-masing kecamatan memberikan perhatian lebih guna percepatan pelaksanaan rehab rumah
- c. Memberikan informasi/sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan bantuan termasuk dalam rehab RTLH.
- d. Memberikan perhatian lebih guna percepatan pelaksanaan rehab RTLH untuk wilayah yang masyarakatnya memegang tradisi perhitungan waktu.

Sedangkan strategi untuk pencapaian sasaran kinerja disamping melakukan sosialisasi arti pentingnya memiliki rumah yang layak huni, juga

merangkul para stekholder untuk berpartisipasi dalam pemugaran RTLH diantaranya melalui CSR.

Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kebutuhan Rumah Layak Huni adalah :

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Misi 6 RPJMD 2016-2021: *Mewujudkan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang Sehat dan Menarik untuk Melaksanakan Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Gerakan Masyarakat, yang Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur / Sarana Prasarana Wilayah yang Memadai.*

Tujuan : Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan peningkatan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan akan perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas akan semakin meningkat, sehingga perlu dilaksanakan upaya penanganan secara bersinergi dengan komponen kehidupan yang lain.

Tabel
Capaian tujuan Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Reali sasi 2016	Reali sasi 2017	Reali sasi 2018	Reali sasi 2019	Reali sasi 2020	Target 2021	Reali sasi 2021	Capaian Kinerja %
persentase permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persen			92,6	93,93	94,77	93,7	95,4	101,81

Capaian kinerja tujuan Terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas, dengan indikator Persentase permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Capaian kinerja ini adalah melalui hasil rata-rata capaian kinerja sasaran yang meliputi 3 (tiga) indikator, dari target pada perjanjian kinerja sebesar 93,7% realisasi capaian kerjanya sebesar 95,4%, sehingga capaian kerjanya sebesar 101,81%.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut pada tahun 2021 adalah dari pelaksanaan Program Kawasan Permukiman, Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Bersih dan Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah. Kegiatannya adalah Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatannya adalah Pembangunan, Peningkatan dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT. Sedangkan capaian kinerja sasarannya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel : Capaian kinerja sasaran Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas dengan indikator cakupan layanan air bersih

Indikator Kinerja	Satuan	Reali sasi 2015	Reali sasi 2016	Reali sasi 2017	Reali sasi 2018	Reali sasi 2019	Reali sasi 2020	Taget 2021	Reali sasi 2021	Capaian Kinerja %
Cakupan layanan air bersih	Persen	78,55	82,78	87,60	90,43	91,01	92,05	93	93,01	100,01

A. Cakupan Layanan Air Bersih

Air bersih adalah air yang dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau diminum dan untuk kebutuhan melakukan aktifitas lainnya sehari-hari. Untuk memenuhi standar akses air minum yang berkelanjutan, maka air dari segi kualitas ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya kualitas fisik yang terdiri tingkat

kandungan pH, kesadahan dan kualitas biologi dimana air terbebas dari micro organisme yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Agar kelangsungan hidup manusia dapat terus terjaga, maka perlu jaminan ketersediaan air minum dalam jumlah yang memadai sesuai dengan aktifitas manusia.

Hasil evaluasi pada sasaran Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Berkualitas dengan *indikator Cakupan layanan air bersih*, mendapat nilai rata-rata 100,05%, artinya masuk kategori sangat berhasil/

Di Kabupaten Purbalingga rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2020 mencapai 92,05% atau 309.838 KK dari 336.598 KK, yang berarti melebihi target 92%.

Pada tahun 2021 rumah tangga yang menggunakan air bersih mencapai 93,01 atau 315.184 dari 338.871 KK, yang berarti melebihi target dengan capaian kinerja 100,01 %. Capaian ini didukung dari pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota, melalui sub kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Bentuk aktifitasnya berupa pembangunan, peningkatan dan perluasan jaringan SPAM dan fasilitasi kegiatan Pamsimas, HAMP, HKP, dengan lokasi sebagaimana pada tabel.

Tabel Lokasi dan Jumlah SR Pembangunan SPAM

No	Lokasi Desa	SR
1	Bak penampung air Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol	0
2	Pembangunan Air Desa Karangreja Kec. Karangreja	0
3	Pamsimas Desa Karangaren Kec. Kutasari	20
4	HAMP Desa Panunggalan Kec. Pengadegan	52

5	HAMP Desa Buara Kec. Karanganyar	48
6	HAMP Desa Ponjen Kec. Karanganyar	48
7	HAMP Desa Palumbungan Kec. Bobotsari	49
8	HAMP Desa Kradenan Kec. Mrebet	50
9	HAMP Desa Karanggambas Kec. Padamara	48
10	HAMP Desa Sokanegara Kec. Kejobong	49
11	HAMP Desa Tamansari Kec. Karangmoncol	48
12	HAMP Desa Serayu Karanganyar Kec. Mrebet	48
13	HAMP Desa Candiwulan Kec. Kutasari	27
14	HAMP Desa Karangcengis Kec. Bukateja	49
15	HAMP Desa Siwarak Kec. Karangreja	48
16	HAMP Desa Adiarsa Kec. Kertanegara	48
17	HAMP Desa Serayu Larangan Kec. Mrebet	48
18	Spam HKP Desa Bumisari Kec. Bojongsari	0
19	Spam HKP Desa Pasunggingan Kec. Pengadegan	6
20	Spam HKP Desa tetel Kec. Pengadegan	0
21	Spam HKP Desa Sidareja Kec. Kaligondang	0
22	Spam HKP Desa Pandansari Kec. Kejobong	25
	Total	711

Tabel Lokasi dan Jumlah SR Peningkatan SPAM

No	Lokasi Desa	SR
1	SPAM Desa kembangan Kec. Bukateja	39
2	SPAM Desa Tegalpingen Kec. Pengadegan	50
3	SPAM Desa Selakambang Kec.Kaligondang	30
4	SPAM Desa Arenan Kec. Kaligondang	39
5	SPAM Desa Pagerandong Kec. Kaligondang	50
6	SPAM Desa Karangcegak Kec. Kutasari	39
7	SPAM Desa Talagening Kec. Bobotsari	39
8	SPAM Desa Tlahab Kudul Kec. Karangreja	39
9	SPAM Desa Kaliori Kec. karanganyar	39
10	SPAM Desa Karangasem Kec. Kertanegara	50
11	SPAM Desa Rajawana Kec. Karangmoncol	50
12	SPAM Desa Sirau Kec. Karangmoncol	58
13	SPAM Desa Losari Kec. Rembang	90
14	SPAM Desa Sempor Lor Kec. Kaligondang	60
15	SPAM Desa Brecek Kec. Kaligondang	110
	Total	782

Tabel Lokasi dan Jumlah SR Perluasan SPAM

No	Lokas Desa	SR
1	SPAM Desa Bantarbarang Kec. Rembang	100
2	SPAM Desa Candinata Kec. Kutasari	120
3	SPAM Desa Kalitinggar Kec. Padamara	55
4	SPAM Desa Kradenan Kec. Mrebet	40
5	SPAM Desa Plumutan Kec Kemangkon.	100
6	SPAM Desa Sangkanayu Kec. Mrebet	120
7	SPAM Desa Selaganggeng Kec. Mrebet	65
8	SPAM Desa Banjarsari Kec. Bobotsari	39
9	SPAM Desa Bodas Karangjati Kec. Rembang	39
10	SPAM Desa Candiwulan Kec. Kutasari	80
11	SPAM Desa Karangjengkol Kec. Kutasari	80
12	SPAM Desa Karangsari Kec. Karangmoncol	50
13	SPAM Desa Kedungjati Kec. Bukateja	30
14	SPAM Desa Makam Kec. Rembang	80
15	SPAM Desa Pepedan Kec.Karangmoncol	90
16	SPAM Desa Sumampir Kec. Rembang	50
17	SPAM Desa Tamansari Kec. Karangmoncol	50
18	SPAM Desa Tanalum Kec. Karangmoncol	86
	Total	1.274

Dengan demikian bila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Rencana Strategis (Renstra) OPD persentase rumah tangga mengakses air minum/air bersih adalah sebesar 93%, maka sudah berhasil tertangani.

Kendala yang dihadapi :

- a. Adanya lokasi kegiatannya sangat sulit, terkadang harus mencari lokasi sumber air bersih yang baru dan tidak berbau karena sumber air yang awal ternyata berbau
- b. Rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan lambat
- c. Terbatasnya debit air dari sumber mata air

Upaya yang dilakukan :

- a. Koordinasi dengan pihak rekanan untuk mengakselerasi tahapan kegiatan.
- b. Mendorong rekanan menambah tenaga kerja untuk mempercepat penyelesaian kegiatan.
- c. Memanfaatkan dan mengembangkan tambahan jaringan dari sumber-sumber mata air yang telah dibangun.

Strategi dalam pencapaian sasaran antara lain dengan menggali potensi sumber mata air baru yang dapat dimanfaatkan serta memetakan wilayah yang rawan kekurangan air bersih, serta melakukan sinergi kegiatan yang didanani dari Dana Desa dan sumber lainnya.

B. Cakupan Layanan Sanitasi.

Salah satu faktor yang menjadi penilaian rumah sehat adalah rumah tinggal berakses sanitasi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik.

Capaian kinerja sasaran ini tersaji pada tabel berikut :

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / Rumah Tangga

Indikator Kinerja	Satuan	Reali sasi 2015	Reali sasi 2016	Reali sasi 2017	Reali sasi 2018	Reali sasi 2019	Reali sasi 2020	Reali sasi 2021	Target 2021	Reali sasi 2021	Capaian Kinerja %
Cakupan layanan sanitasi	Persen	70	78,58	84,35	87,48	90,77	92,26	93,18	88	93,18	105,88

Hasil evaluasi pada sasaran Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Berkualitas dengan indikator Cakupan layanan sanitasi, mendapat nilai rata-rata 105,88% dengan kategori sangat berhasil.

Pada tahun 2020 cakupan sistem air limbah rumah tangga pada perjanjian kinerja dengan target 87% realisasinya berhasil mencapai 92,26%. Pada tahun 2021 dengan target 88% dapat tercapai 93,18%. Indikator ini merupakan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Pekerjaan Umum, dengan harapan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari pencemaran lingkungan akibat pengelolaan air limbah yang tidak benar.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub Keegiatannya Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT yang pada tahun 2021 tersebar di 11 lokasi dengan jumlah KK terakses sebanyak 580 KK. Serta adanya tambahan kontribusi dari kegiatan jambanisasi yang dikelola OPD terkait.

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai Rencana Strategis (Renstra) OPD cakupan penanganan sanitasi adalah sebesar 88%, maka sudah melebihi target. Sehingga pada tahun anggaran berikutnya adalah menangani rumah tangga yang belum masuk dalam daftar penanganan prioritas.

Tabel. Lokasi dan Jumlah KK terakses Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam daerah Kabupaten/Kota

No	Lokasi Desa	Akses KK
1	Bantarbarang Kec. Rembang	53
2	Brecek Kec. Kaligondang	50
3	Candinata Kec. Kutasari	50
4	Cilapar Kec. Kaligondang	53
5	Kalitinggar Kec. Padamara	50
6	Kradenan Kec. Mrebet	50
7	Plumutan Kec. kemangkon	62
8	Selaganggeng Kec. Mrebet	50
9	Sempor Lor Kec. Kalogondang	50
10	Sangkanayu Kec. Mrebet	50
11	Grantung Kec. Karangmoncol	62
	Total	580

Kendala dalam pelaksanaan :

- a. Masih adanya sebagian masyarakat yang tingkat kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah/sanitasi masih rendah.

Upaya yang dilakukan :

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat.

C. Luasan Kawasan Tidak Kumuh

Disamping ketersediaan air minum yang berkelanjutan dan akses sanitasi, maka juga diperlukan pengelolaan lingkungan permukiman yang sehat, sehingga kelangsungan hidup manusia tetap terjaga.

Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya lingkungan permukiman yang sehat perlu terus dilakukan.

Tabel : *Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Berkualitas*

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja %
Luasan kawasan tidak kumuh	Ha	1.423,37 (98,70%)	1.437,58 (99,69%)	1.440,61 (99,90%)	1.442 (100%)	1.442 (100%)	1.442 (100%)	1.442 (100%)	100%

Hasil evaluasi pada sasaran Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Berkualitas dengan indikator Luasan kawasan tidak kumuh, mendapat nilai rata-rata 100 % dengan kategori berhasil.

Indikator dari sasaran tersebut dapat dicapai karena pada tahun sebelumnya sudah tercapai 100%. Pada tahun 2021 aktifitas yang dilakukan adalah dengan jalan menjaga agar tidak terjadi timbulnya kumuh baru di area/lokasi yang sudah selesai tertangani. Program yang mendukung penanganan kawasan kumuh pada tahun 2021 adalah Program Kawasan Permukiman dengan salah satu kegiatannya adalah Kegiatan Peningkatan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha. Sedangkan Sub Kegiatannya adalah Perbaikan rumah tidak layak huni.

Penanganan untuk tahun berikutnya akan mendasarkan pada SK kumuh yang baru.

Program kegiatan lainnya yang mendukung capaian indikator ini adalah Program Peningkatan Prasarana, Sarana Utilitas Umum, yang aktifitasnya meliputi pemeliharaan/perbaikan jalan lingkungan.

Program dan kegiatan tersebut adalah untuk mendukung Program KOTAKU yang merupakan program nasional yang dimaksudkan agar terwujud kawasan lingkungan perkotaan terbebas dari kekumuhan. Namun pada tahun 2021 Program KOTAKU tidak ada.

Di Kabupaten Purbalingga luasan kawasan perkotaan adalah 1.442 ha, sedangkan luasan kawasan kumuh perkotaan pada tahun 2015 seluas 32,39 Ha yang meliputi kawasan kumuh taraf ringan seluas 30,17 Ha dan kawasan kumuh taraf sedang seluas 2,22 Ha (RPJMD 2016-2021) yang dari tahun ke tahun sudah semakin menurun luasannya.

Pada akhir tahun 2018 luasan kawasan kumuh menjadi 1,39 ha karena sisa 4,42 ha pada tahun 2017 dapat tertangani 3,03 pada tahun 2018 melalui program KOTAKU di wilayah Kecamatan Purbalingga yaitu Kelurahan Kandangampang (3,03 ha). Sedangkan di Kelurahan Purbalingga Wetan (1,39 ha potensi kumuh) diatasi pada tahun 2019. Dengan demikian pada tahun 2019 dan seterusnya kegiatannya tidak berupa penanganan kawasan kumuh, namun pencegahan timbulnya kawasan. Sedangkan kegiatan dalam rangka pencegahan timbulnya luasan kumuh pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada karena anggarannya digunakan untuk mendukung penanganan Covid 19.

Kendala / permasalahan yang dihadapi :

- a. Belum adanya satu data satu peta satu perencanaan dalam penanganan kumuh.
- b. Penanganan kumuh dilakukan belum terfokus dan mampu merubah wajah permukiman
- c. Penganggaran dana penanganan kumuh dari Pusat sangat terbatas. Tahun 2021 tidak ada.
- d. Masih rendahnya tingkat kesadaran warga masyarakat akan arti pentingnya lingkungan permukiman yang rapi dan sehat.
- e. Kurang optimalnya sinergi program kegiatan antar OPD yang dapat mendukung program KOTAKU.

Upaya mengatasi kendala / permasalahan :

- a. Perlunya keterpaduan dalam perencanaan penanganan kumuh (satu data satu peta).
- b. Perlu penanganan kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati yang baaru pada tahun berikutnya dengan dukungan anggaran yang memadai.

- c. Penanganan kumuh/potensi kumuh ke depan dapat dilakukan secara terfokus dan tuntas/komprehensif yang lokasi penanganannya mengacu pada SK kumuh baru, serta didukung dengan anggaran yang memadai sehingga mampu merubah wajah permukiman.
- d. Perlu adanya dana yang berkelanjutan dari Pusat karena penanganan kumuh membutuhkan waktu yang tidak singkat.
- e. Meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pencegahan kumuh dan penanganan permukiman kumuh.

Strategi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan, swasta, bahkan pihak terkait lainnya, termasuk peran serta secara aktif masyarakat, terutama dalam memperbaiki infrastruktur permukiman yang dibangun di lokasi mereka.

Tujuan : Terwujudnya legalitas dan tertib pemanfaatan tanah

- Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 Dalam rangka mewujudkan kawasan perkotaan dan perDesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan Budaya, perlu didukung dengan Penyediaan Infrastruktur / Sarana Prasarana Wilayah yang Memadai. Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah salah satu upaya pemerintah menyediakan infrastruktur / sarana prasaran wilayah yang terus meningkat.

Tabel : *Capaian tujuan* Terwujudnya legalitas dan tertib pemanfaatan tanah

Indikator Kinerja	Satuan	Reali sasi 2018	Reali sasi 2019	Reali sasi 2020	Target 2021	Reali sasi 2021	Capaian Kinerja %
Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Persen	63,64	70	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas Hasil evaluasi pada tujuan Terwujudnya legalitas dan tertib pemanfaatan tanah dengan indikator persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendapatkan nilai rata-rata 100 dengan kategori berhasil.

Capaian kinerja tujuan Terwujudnya legalitas dan tertib pemanfaatan tanah dengan indikator kinerja Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Dinas Perumahan dan Permukiman baru melakukan kegiatan tersebut mulai tahun 2018, 2019, 2020 dan pada tahun 2021 kegiatan pengadaan tanah capaian kerjanya 100% yaitu untuk persiapan pembangunan Rest Area Bandara Jenderal Besar Sudirman di Desa Tidu Kecamatan Bukateja. Pengadaan tanah tersebut berhasil direalisasi 100%.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak selalu mencapai 100% dari kebutuhan, karena prosesnya tidak mudah dan sangat tergantung persetujuan antara Apraisal dengan para pemilik tanah yang tanahnya akan diganti.

Keberhasilan tahun ini adalah adanya kerja sama yang baik dan lancar antara para pihak yang terkait, diantaranya dengan BPN, Apraisal, dan pemilik tanah.

Kendala yang dihadapi :

- a. Perlunya waktu yang lam dalam sosialisasi, koordinasi, dan pemberkasan persyaratan proses pelepasan tanah.

Solusi yang dilakukan :

- a. Melakukan pendekatan dan sosialisasi rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada warga yang terdampak.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dan serta dengan BPN dalam proses pemberkasan dan pelepasan hak atas tanah.

Sedangkan Sasaran dari kinerja Tujuan tersebut adalah meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah:

Bahwa aset tanah-tanah Pemerintah Daerah perlu dilindungi baik secara hukum maupun secara fisik agar tingkat legalitasnya kuat dan terjamin secara hukum. Pada sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu : Persentase tanah Pemda yang bersertifikat dan Tanah Pemda yang dimanfaatkan, yang tabelnya tersaji pada tabel sebagai berikut

Tabel : *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah*

Indikator Kinerja	Satuan	Reali sasi 2018	Reali sasi 2019	Reali sasi 2020	Target 2021	Reali sasi 2021	Capaian Kinerja %
Persentase tanah milik Pemda bersertifikat	Persen	63,81	64,98	67,72	64,01	70,64	110,35

A. Persentase tanah milik Pemda bersertifikat

Hasil evaluasi pada sasaran Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah dengan indikator Persentase tanah milik Pemda bersertifikat, mendapat nilai rata-rata 110,35% dengan kategori sangat berhasil.

Pada tahun 2021 berdasarkan perjanjian kinerja targetnya adalah 64,01%. Realisasi capaian tanah Pemda yang berhasil disertifikat mencapai 70,64 % atau capaian kinerjanya sebesar 110,35% dari target.

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh adanya peningkatan sinergi kerja sama dengan BPN dan semua pihak yang terkait.

Kendala yang dihadapi :

1. Kesulitan dalam melengkapi data pemberkasan bidang tanah yang diajukan disertifikat, karena para pihak yang terkait dengan kelengkapan dokumen bidang tanah keberadaannya di luar wilayah Kabupaten.

Solusi yang dilakukan :

1. Menjalani komunikasi dan kerja sama yang baik dan intensif dengan para pihak yang terkait, baik dengan warga masyarakat maupun BPN.

Tabel : *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah*

Indikator Kinerja	Satuan	Reali sasi 2018	Reali sasi 2019	Reali sasi 2020	Target 2021	Reali sasi 2021	Capaian Kinerja %
Persentase tanah Pemda yang dimanfaatkan	Persen	79,75	80,09	80,10	80,15	87,6	109,3

B. Persentase tanah Pemda yang dimanfaatkan

Hasil evaluasi pada sasaran Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah

Dengan indikator Persentase tanah Pemda yang dimanfaatkan, mendapat nilai rata-rata 109,3% dengan kategori sangat berhasil.

Pada tahun 2021 berdasarkan perjanjian kinerja capaian kinerjanya adalah sebesar 80,15%, realisasinya mencapai 87,6%. Capaian ini berbanding lurus dengan peningkatan capaian target PAD dari pemanfaatan Pemda yang mencapai 125,93%.

Program kegiatan yang mendukung capaian ini adalah Program Penatagunaan Tanah. Hal ini dapat tercapai karena bertambahnya tanah Pemda yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kendala dalam capaian kinerja ini :

- a. Berkurangnya bidang tanah Pemda yang dapat dimanfaatkan karena adanya alih fungsi (yang tadinya dimanfaatkan untuk pertanian menjadi digunakan untuk bangunan gedung), serta yang dihibahkan ke instansi vertikal.
- b. Adanya warga masyarakat yang enggan memanfaatkan tanah Pemda dengan alasan kurang menguntungkan secara ekonomi.

Solusi yang dilakukan :

- a. Membuka akses jalan tanah Pemda sehingga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat yang memanfaatkannya
- b. Melakukan persuasi kepada masyarakat untuk dapat/tertarik memanfaatkan tanah Pemda.
- c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah Pemda yang belum dimanfaatkan dan bernilai ekonomi.

Selanjutnya mengenai capaian kinerja kegiatan tahun 2021 secara garis besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL CAPAIAN KINERJA KEGIATAN 2021

NO.	KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN Rp.	REALISASI FISIK	PERMASALAHAN
				(%)	
I	PENDAPATAN		725.000.000	913.007.232 (125,93 %)	
II	BELANJA		36.353.363.600		
A	SEKRETARIAT		3.427.695.000	99,58	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		3.200.842.000		
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	DAU	10.700.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8.098.000	100	
	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.602.000	100	
2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	DAU	2.809.732.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD		110.545.000	100	
	b. Penyusunan Pelaporan dan Prognosis Realisasi Anggaran		2.495.000	100	
	c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.647.887.000	100	

	d.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN		48.805.000	100	
3	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	DAU	0	0	Direfocusing untuk penanganan Covid 19
	Sub Kegiatan:				
	a. Bintek Aparatur		-		
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DAU	122.106.000	100,00	
	Sub Kegiatan:				
	a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		2.050.000	100	
	b.Penyediaan Bahan Logistik Kantor		101.828.000	100	
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.003.000	100	
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.400.000	100	
	e.Penyediaan Bahan Material		4.075.000	100	
	f.Penyelenggaraan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		8.750.000	100	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		41.896.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		41.896.000	100	
6	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	DAU	153.023.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.000.000	100	
	b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		25.923.000	100	
	c.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.300.000	100	
	d.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		124.800.000	100	

7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DAU	63.385.000	97,5	
	Sub Kegiatan:				
	a.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional / lapangan		56.860.000	95	
	b.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.525.000	100	
*	BIDANG PERUMAHAN		3.285.077.600	100,0	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM				
1	Kegiatan Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	DAU	3.194.646.600	100	
	Sub Kegiatan:				
	1. Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian		3.183.451.600	100	
	2.Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyerahan Prasaran Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan		11.195.000	100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
1	Kegiatan Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	DAU	5.050.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		5.050.000	100	
2	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	DAU	36.669.000	100	

	Sub Kegiatan:				
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		36.669.000	100	
3	Kegiatan Penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	DAU	48.712.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh		48.712.000	100	
**	BIDANG PERMUKIMAN		6.705.914.000	97,295	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
1	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/Kota	DAU	13.682.176.000	100,00	
	Sub Kegiatan:				
	1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan		3.000.485.000	100	
	2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan		3.919.074.000	100	
	3. Perluasan SPAM Jaringan SPAM di Kawasan Pedesaan		6.762.617.000	100	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERSAMPAHAN REGIONAL				
2	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	DAK	1.810.140.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		1.810.140.000	100	

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
3	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kkabupaten/Kota	DAK	3.522.427.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	1. Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		90.000.000	0	Akan ada program sejenis dari Prop, Lokasi peruntukannya belum ada kepastian
	2. Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		3.432.427.000	100	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
4	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha	DAU	90.000.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman		90.000.000	100	
5	Kegiatan Peningkatan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha		7.601.171.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		7.020.498.000	100	
	2. Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		580.673.000	100	Aktifitas sesuai disposisi Bupati (Pbg Gayeng)
***	BIDANG PERTANAHAN		3.161.530.000	100	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				

1	Kegiatan Peyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	DAU	2.902.400.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.902.400.000	100	
2	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	DAU	11.370.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		11.370.000	100	
3	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	247.760.000	100	
	Sub Kegiatan:				
	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		247.760.000	100	
	JUMLAH TOTAL		36.353.363.600		

Dari tabel tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dan capaian kinerjanya hingga rata-rata 100%, Untuk Kegiatan Purbalingga Gayeng (100%), realisasinya mencukupi pengajuan proposal yang berdasarkan persetujuan / disposisi Bupati atas proposal yang diajukan oleh warga masyarakat yang membutuhkan bantuan material bangunan.

Untuk Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota belum dilaksanakan karena berdasarkan koordinasi dengan pihak Provinsi akan ada program sejenis yang akan dilaksanakan, serta penentuan lokasi yang akan ditetapkan dalam dokumen tersebut belum ada.

ii. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan pada OPD Dinrumkim dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TA. 2021 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO.	KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN Rp.	REALISASI	CAPAIAN REALISASI	PERMASALAHAN
				Rp.	%	
I	PENDAPATAN		725.000.000	913.007.232	125,93	
II	BELANJA		36.353.363.600	33.732.532.499	92,79	
A	SEKRETARIAT		3.200.842.000	2.966.041.159	92,66	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		3.200.842.000	2.966.041.159	92,66	
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	DAU	10.700.000	10.460.000	97,76	
	Sub Kegiatan:					
	a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8.098.000	7.980.000	98,54	
	b.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.602.000	2.480.000	95,31	
2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	DAU	2.809.732.000	2.599.896.980	92,53	
	Sub Kegiatan:					
	a.Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD		110.545.000	108.225.605	97,90	
	b.Penyusunan Pelaporan dan Prognosis Realisasi Anggaran		2.495.000	2.399.000	96,15	

	c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.647.887.000	2.440.735.275	92,17	
	d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN		48.805.000	48.537.100	99,45	
3	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	DAU	0	0	0	DIREFOKUSING KE PENANGANAN COVID 19
	Sub Kegiatan:					
	a. Bintek Aparatur		0	0	0	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DAU	122.106.000	120.548.755	98,72	
	Sub Kegiatan:					
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		2.050.000	2.044.400	99,72	
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		101.828.000	101.630.955	99,80	
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.003.000	3.003.000	100	
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.400.000	2.160.000	90	
	e. Penyediaan Bahan Material		4.075.000	4.063.300	99,70	
	f. Penyelenggaraan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		8.750.000	7.647.100	87,40	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		41.896.000	41.896.000	100	
	Sub Kegiatan:					
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		41.896.000	41.896.000	100	
6	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	DAU	153.023.000	139.851.074	91,39	
	Sub Kegiatan:					
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.000.000	1.000.000	100	
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		25.923.000	13.356.074	51,52	
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.300.000	1.295.000	99,62	

	d.Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor		124.800.000	124.200.000	99,52	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DAU	63.385.000	53.388.350	84,26	
	Sub Kegiatan:					
	a.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional / lapangan		56.860.000	46.929.000	82,53	
	b.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.525.000	6.459.350	98,99	
*	BIDANG PERUMAHAN		3.285.077.600	3.256.473.140	99,95	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM					
1	Kegiatan Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	DAU	3.194.646.600	3.188.252.790	99,80	
	Sub Kegiatan:					
	1.Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian		3.183.451.600	3.178.950.990	99,86	
	2.Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyerahan Prasaran Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan		11.195.000	9.301.800	83,08	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
1	Kegiatan Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	DAU	5.050.000	1.722.200	34,10	
	Sub Kegiatan:					
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		5.050.000	1.722.200	34,10	

2	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	DAU	36.669.000	29.055.600	79,24
	Sub Kegiatan:				
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		36.669.000	29.055.600	79,24
3	Kegiatan Penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	DAU	48.712.000	37.442.550	76,87
	Sub Kegiatan:				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh		48.712.000	37.442.550	76,87
**	BIDANG PERMUKIMAN		26.705.914.000	24.416.393.748	91,43
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
1	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/Kota	DAU	13.682.176.000	11.656.366.400	85,19
	Sub Kegiatan:				
	1.Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan		3.000.485.000	2.697.460.000	89,90
	2.Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan		3.919.074.000	3.503.845.400	89,40
	3.Perluasan SPAM Jaringan SPAM di Kawasan Pedesaan		6.762.617.000	5.455.061.000	80,66
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				

2	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten	DAK	1.810.140.000	1.798.466.000	99,36	
	Sub Kegiatan:					
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS		1.810.140.000	1.798.466.000	99,36	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
3	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kkabupaten/Kota	DAK	3.522.427.000	3.420.191.500	97,10	
	Sub Kegiatan:					
	1.Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		90.000.000	0	0	BELUM ADA KEJELSAN LOKASI PERUNTUKANNYA
	2.Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		3.432.427.000	3420.191.500	97,10	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
4	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha	DAU	90.000.000	89.772.000	99,75	
	Sub Kegiatan:					
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman		90.000.000	89.772.000	99,75	
5	Kegiatan Peningkatan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha		7.601.171.000	7.451.597.848	98,03	
	Sub Kegiatan:					
	1.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		7.020.498.000	7.004.699.998	99,77	

	2. Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		580.673.000	446.897.850	76,96	
***	BIDANG PERTANAHAN		3.161.530.000	3.093.624.452	97,86	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
1	Kegiatan Peyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	DAU	2.902.400.000	2.854.668.753	98,36	
	Sub Kegiatan:					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.902.400.000	2.854.668.753	98,36	
2	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Daerah Kabupaten/Kota	DAU	11.370.000	5.895.000	51,85	
	Sub Kegiatan:					
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		11.370.000	5.895.000	51,85	
3	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	247.760.000	233.060.699	94,07	
	Sub Kegiatan:					
	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		247.760.000	233.060.699	94,07	
	JUMLAH TOTAL		36.353.363.600	33.732.532.499	92,79	

Dari tabel tersebut di atas capaian kinerja keuangan rata rata mencapai 85,11%. Walaupun realisasi anggaran tidak mencapai maksimal (100%), namun kegiatan yang dilaksanakan dapat diselesaikan dengan baik.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga dalam Tahun Anggaran 2020 berikut hasil pengukuran serta analisa dan evaluasi kinerja sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan secara umum sebagai berikut:

1. Kinerja kegiatan

Dari 18 paket kegiatan, 35 sub kegiatan pada DINRUMKIM tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan berhasil dan efisien secara pengukuran dari :

a. Input

Realisasi pembiayaan dibawah target dana yang disediakan sehingga tercapai efisiensi, realisasinya mencapai nilai maksimal 100% dari target yang direncanakan.

b. Output

Realisasinya secara kuantitas dalam kisaran pencapaian nilai maksimal dari target yang direncanakan, begitu pula secara kualitas mampu mencapai nilai sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan

c. Outcome

Seluruh keluaran hasil pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan telah berfungsi secara efektif dan dimanfaatkan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan serta sesuai dengan yang dibutuhkan.

d. Benefit

Hasil seluruh kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dukungan maksimal terhadap kelancaran segala aspek kegiatan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak.

e. Impact

Dampak dari hasil kegiatan sub kegiatan telah menunjukkan terwujudnya kelancaran dan peningkatan berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang cenderung berkembang, sedangkan secara terukur belum dapat memberikan penilaian pasti karena masih kesulitan dalam pengumpulan data pendukung dari berbagai instansi terkait.

2. Kinerja sasaran

Dari aspek sasaran dapat diukur bahwa secara keseluruhan kegiatan sub kegiatan tahun 2021 pada DINRUMKIM dapat dilaksanakan dengan berhasil dan efisien, secara langsung telah memberikan pengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran yang cenderung menggambarkan keberhasilan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan serta pada akhirnya menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian sebagaimana dicanangkan dalam RENSTRA – DINRUMKIM tahun 2016 – 2021.

B. Permasalahan Yang Dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi dan merupakan kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan pada DINRUMKIM secara umum adalah bersifat alami yaitu mengingat wilayah Purbalingga merupakan daerah rawan bencana alam dan bermusim penghujan dengan intensitas tinggi yang berakibat :

- a. Menghambat waktu selesainya pelaksanaan kegiatan.
- b. Kerusakan sarana dan prasarana fisik karena bencana alam.

Permasalahan lainnya adalah ketidakkonsistenan (kurang profesional) pelaksana / pihak ketiga dalam menjalankan jadwal kerja penyelesaian kegiatan, dan dimulainya kegiatan APBD Perubahan yang mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga waktu efektif pelaksanaan pekerjaan sangat singkat/pendek.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Terhadap permasalahan waktu penyelesaian kegiatan yang terhambat karena faktor cuaca diupayakan memberikan perpanjangan waktu melaksanakan suatu kegiatan namun masih dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan.

Hal lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah

- a. Perlu adanya pembinaan teknik pada Rekanan/kontraktor, diantaranya adalah ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan peralatan mesin/non manual untuk mendukung mempercepat pekerjaan jika diperlukan.
- b. Pemberian sanksi administrasi terhadap kontraktor yang gagal menyelesaikan kegiatan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- c. Pemenang lelang kegiatan diharapkan adalah Rekanan yang memiliki pengalaman pekerjaan pada kegiatan yang dikontrakan serta profesional.
- d. Adanya pengawasan teknis di lapangan yang lebih intensif dalam tiap pentahapan pelaksanaan kegiatan

Demikian Laporan Kinerja – DINRUMKIM tahun 2021 yang dapat disajikan dan sudah barang tentu masih banyak kekuarungannya, namun diharapkan seminimal apapun laporan ini dapat memberikan informasi dan gambaran yang bermanfaat mengenai hasil seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DINRUMKIM selama Tahun Anggaran 2021.

Purbalingga, Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Purbalingga


Drs. IMAM HADI, M.Si.

NIP. 19650104 198607 1 001